

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Rokan Hilir)

Yusrawati¹ dan Nina Cahyanti²

INFO ARTIKEL

Penulis:

¹Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

*E-mail: yusrahusaimi@yahoo.co.id

Untuk mengutip artikel ini:

Yusrawati & Cahyanti, Nina, 2016, 'Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan pelaporan laporan keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Rokan Hilir, Vol. 27, No. 1, Hal. 21-29.

Akses online:

<https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>

E-mail:

kiat@jurnal.uir.ac.id

ABSTRAK

Akuntabilitas dapat diimplementasikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan harus dapat diandalkan agar dapat dipercaya oleh pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Populasi dalam penelitian ini adalah biro dinas yang terdiri dari 30 SKPD di Kabupaten Rokan Hilir. Setiap instansi dan biro menyelesaikan 3 pertanyaan. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah.

Accountability can be implemented in regional government financial statements. The financial statements must be reliable in order to be trusted by users. The aim of this research is to know the influence of human resource capacity, the usage of information technology, and accounting internal control on the reliability of the government financial reporting of Kabupaten Rokan Hilir. The population of this research is agencies bureaus consists of 30 SKPD in Kabupaten Rokan Hilir. Each agency and bureaus completed 3 questions. The data are analyzed using multiple linear regression. The result of this research indicated that the human resource capacity, the usage of information technology, and accounting internal control variables have an influence on reliable government financial reporting.

Katakunci: Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, Keterandalan Laporan Keuangan

1. Pendahuluan

Pemerintah adalah entitas pelapor (reporting entity) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawabannya karena : (a) pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan; (b) penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat; dan (c) terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut. (Nurillah 2014) .

Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan. Fungsi informasi dalam laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian

informasi keuangan tersebut tidak andal dan tepat waktu. Keandalan dan tepat waktu informasi keuangan merupakan wujud pertanggung jawaban pengelolaan keuangan publik dan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 merupakan dua nilai unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan.

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, keterandalan pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk

menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi tugas yang jelas, sumber daya manusia tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Faktor lain yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan adalah pengendalian Intern. Dalam PP no. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menciptakan pengendalian akuntansi yang efektif antara lain (Wahana Komputer, 2003) : (a) adanya perlindungan fisik terhadap harta; (b) pemisahan fungsi organisasi yaitu pemisahan fungsi organisasi yang saling berkaitan; (c) adanya jejak audit yang baik; dan (d) sumber daya manusia yang optimal.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zuliarti (2012) dengan judul pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah study pada pemerintah kabupaten Kudus menemukan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sementara pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Minaryanti (2013) dengan judul pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah study pada pemerintah Kabupaten Majene Sulawesi Barat yang menemukan bahwa pengendalian intern mempunyai pengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sementara kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hasil tidak konsisten tersebut dikarenakan perbedaan responden yang digunakan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi kuantitas, telah ada beberapa satuan kerja yang sudah memiliki beberapa pegawai akuntansi. Dari sisi kualitas, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang sudah memiliki uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang terspesifikasi dengan jelas.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Telaah Teoritis

2.1 Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Indriasari (2008:11), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi dapat dilihat dari kompetensi sumber daya tersebut, sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Jadi kapasitas merupakan suatu karakteristik dari seorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Menurut beberapa pakar, kapasitas adalah karakteristik yang mendasari seorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyaio pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga. Skill merupakan kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas dari hasil pelatihan dan pengalaman.

2.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penerapan Teknologi Informasi tidak hanya pada sektor bisnis, tetapi pada sektor publik khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mutlak harus diutuhkan. Seagai contoh pengajuan perijinan, pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), pembuatan surat ijin mengemudi (SIM) maupun informasi profil daerah. Seperti halnya perusahaan, pemerintah menghadapi masalah dalam penerapan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Celviana dan Rahmawati, 2010).

Astuti dan I ketut (2009), faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut : 1.) Faktor sosial 2.) *Affect* (perasaan individu) 3.) Kesesuaian tugas 4.) Konsekuensi jangka

panjang 5.) Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi 6.) Kompleksitas

2.3 Pengendalian Intern Akuntansi

Jogianto (2000:373) mendefinisikan sebagai berikut: pengendalian intern meliputi struktur suatu organisasi dan semua metode-metode yang terkoordinir serta ukuran-ukuran yang ditetapkan didalam suatu perusahaan untuk tujuan menjaga harta kekayaan milik perusahaan, memeriksa ketetapan dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi kegiatan, dan mendorong ditaatinya kebijaksanaan-kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan.

Dalam PP no. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan adanya pengendalian intern:

1. Menjaga kekayaan organisasi/ mengamankan aset
2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi
3. Mendorong efisiensi
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Dilihat dari tujuan tersebut maka pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua macam yaitu, pengendalian akuntansi (*internal auditing control*) dan pengendalian administrasi (*internal administrative control*).

2.4 Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yakni bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi (Celviana dan Rahmawati, 2010).

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut :

1. Penyajian Jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
2. Dapat Diverifikasi
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

2.5 Agency Theory (Teori Keagenan)

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976) Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*).

2.6 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-limuan sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu.

Menurut Faristina (2011), terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum sebagai berikut:

1. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam *tangible*, insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku.
2. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

2.7 Hubungan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah

PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 telah membawa perubahan besar dan memberikan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan yang mendasar dalam PP Nomor 105 Tahun 2000 adalah terkait dengan perubahan dalam sistem penganggaran, baik proses penganggarnya maupun bentuk dan struktur APBD. Perubahan tersebut merupakan suatu perubahan yang bersifat paradigmatik, sementara perubahan yang lebih bersifat pragmatik dan teknis operasional diatur dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, yaitu terkait dengan penatausahaan keuangan daerah. Perubahan itu sudah sampai pada teknik akuntansinya yang meliputi perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan sistem pengendalian intern, laporan, serta

pengawasan (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006).

Perubahan tersebut membutuhkan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai. Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia subbagian akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan daerah pernah dilakukan oleh Desi dan Ertambang (2008).

Temuan empiris dari penelitian mereka menunjukkan masih minimnya pegawai berlatar pendidikan akuntansi, belum jelasnya *job description*, dan belum dilaksanakannya pelatihan-pelatihan untuk menjamin fungsi akuntansi berjalan dengan baik pada Pemerintah Kota Palembang, atau Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan. Walaupun sistem akuntansi yang dibangun sudah baik tetapi sumber daya manusianya tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakannya, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi yang ada dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi bisa jadi kualitasnya buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, salah satunya keterandalan sebagaimana yang masih banyak ditemui dalam pelaporan keuangan pemerintah.

2.8 Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindak lanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

2.9 Hubungan Pengendalian Intern Akuntansi dan keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Penyimpangan dan kebocoran yang masih ditemukan di dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yaitu keterandalan. Bila dikaitkan dengan penjelasan mengenai pengendalian intern akuntansi, maka penyebab ketidakandalan laporan keuangan tersebut merupakan masalah yang berhubungan dengan pengendalian intern akuntansi.

2.10 Hipotesis

- H1: Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- H2: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- H3: Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- H4: Kapasitas sumber daya manusia, Pemanfaatan teknologi informasi, Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

3. Metode Penelitian

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah dinas, badan, kantor dan kecamatan pada 30 SKPD di Kabupaten Rokan Hilir. Responden pada penelitian ini adalah kepala bagian keuangan, bagian akuntansi, dan bendahara. Masing – masing dinas yang menjadi objek akan dikirim 3 kuisisioner.

3.2 Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.2.1 Variabel Independen

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kapasitas sumber daya manusia yang merupakan kemampuan dari staf bagian akuntansi/keuangan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan yang diperoleh responden, pemahaman mengenai tugas, dan tanggung jawab terhadap kewajiban.

Pengukuran variabel ini terdiri dari 10 item pertanyaan. Setiap item menggunakan instrumen kuisisioner, dengan model skala Likert lima poin. Alternative skornya (1) “Sangat Tidak Setuju”, (2) “Tidak Setuju”, (3) “Ragu-ragu”, (4) “Setuju”, (5) “Sangat Setuju”. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya (Dita, 2011).

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Wilkinson et al. (2000) Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce* dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasimencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (hamzah, 2009).

Pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan instrumen zuliarti (2012). Pengukuran variabel ini menggunakan 9 item pertanyaan. Dengan skala likert 5 point. Skor terendah (1) intensitasnya “Sangat Tidak

Setuju” kemudian skor tertinggi (5) intensitasnya “Sangat Setuju”.

3. Pengendalian Intern Akuntansi

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2005 dalam Celviana dan Rahmawati, 2010).

Pengendalian Intern Akuntansi diukur dengan instrumen zuliarti (2012). Pengukuran variabel ini menggunakan 9 item pertanyaan. Dengan skala likert 5 point. Skor terendah (1) intensitasnya “Sangat Tidak Setuju” kemudian skor tertinggi (5) intensitasnya “Sangat Setuju”.

3.2.2 Variabel Dependen

Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Keterandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lampiran II (2010), keterandalan pelaporan keuangan diukur berdasarkan transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan, neraca disajikan, laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD disajikan, catatan atas laporan keuangan disajikan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, rekonsiliasi dilakukan secara periodik anatara catatan akuntansi dengan catatan bank atau catatan pihak eksternal yang membutuhkan konfirmasi atau rekonsiliasi, dan informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Pengukuran variabel ini menggunakan 6 item pertanyaan. Dengan skala likert 5 point. Skor terendah (1) intensitasnya “Sangat Tidak Setuju” kemudian skor tertinggi (5) intensitasnya “Sangat Setuju”.

3.3 Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Analisis yang digunakan adalah model regresi berganda.

Bentuk persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = keterandalan pelaporan keuangan
- a = konstanta
- $b_{(1,2,3)}$ = koefisien regresi masing-masing X
- X_1 = kapasitas sumber daya manusia
- X_2 = pemanfaatan teknologi informasi
- X_3 = pengendalian intern
- E = error

1. Pengujian secara parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji secara individu variabel dependen pada indenpenden. Dalam penelitian ini digunakan tingkat *signifikan* (0,05) untuk menguji apakah hipotesis yang digunakan dalam penelitian didukung atau tidak.

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikan $t > 0,05$ maka hipotesis ditolak. Ini berarti bahwa secara parsial variabel indenpenden tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikan $t \leq 0,05$ maka hipotesis diterima. Ini berarti signifikan terhadap variabel dependen

2. Pengujian secara simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel indenpenden secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai $\text{sig} > \alpha = 0,05$ maka hipotesis ditolak. Ini berarti bahwa secara simultan variabel indenpenden tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai $\text{sig} < \alpha = 0,05$ maka hipotesis diterima. Ini berarti berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Deskripsi Responden

Data dari penelitian ini diambil dengan cara menyebarkan kuesioner pada 30 SKPD di kabupaten Rokan Hilir.

Tabel 1. Jumlah responden dan Tingkat Pengembalian

Keterangan	Jumlah	Persentase
Total kuesioner yang dikirim	90	100%
Total kuesioner yang kembali	75	83.33%
Total kuesioner yang tidak kembali	25	16.67%
Total kuesioner yang tidak dapat dianalisis	-	-
Total kuesioner yang dapat dianalisis	75	83.33%

Sumber: Data Olahan, 2015

4.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah. Berdasarkan hasil kuesioner, tabel *descriptive statistic* memperlihatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	75	29	47	39.61	3.831
X2	75	27	45	36.49	4.425
X3	75	29	45	36.77	3.611
Y	75	21	30	24.63	1.964

Sumber: Data *Output* SPSS, 2015

Pada tabel *descriptive statistics*, menunjukkan bahwa nilai rata-rata jawaban responden terhadap variabel keterandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah sebesar 24.63 dengan standar deviasi sebesar 1.964. Untuk variabel kapasitas sumber daya manusia, nilai rata-rata yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah sebesar 39.61 dengan standar deviasi sebesar 3.831.

Untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi, nilai rata-rata variabel keterandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah sebesar 36.49 dengan standar deviasi sebesar 4.425. Sedangkan variabel pengendalian intern akuntansi, nilai rata-rata variabel keterandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah 36.77 dengan standar deviasi 3.611.

4.3 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Hasil analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 17.0 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Estimasi Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.
1	(Constant)		2.202	3.975 .000
	X1	.121	.055	.236 2.213 .030
	X2	.095	.046	.215 2.056 .044
	X3	.206	.055	.379 3.764 .000

Sumber: Data *Output* SPSS, 2015

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

$$Y = 8.755 + 0.121 X_1 + 0.095 X_2 + 0.206 X_3 + e$$

4.4 Koefisien Determinasi (R²)

Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.654 ^a	.428	.404	1.517

Sumber: Data *Output* SPSS, 2015

Berdasarkan variable diatas diperoleh nilai R sebesar 0,654 R square (R²) sebesar 0,428 atau 42,8%. Dari hasil yang terlihat variable kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi, dapat menjelaskan variable dependen yaitu keterandalan pelaporan keuangan pemerintah sebesar 65,4% sedangkan sisanya 34,6% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model atau persamaan regresi ini.

4.5 Pengujian Hipotesis

4.5.1 Pengujian secara simultan (F Test)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel independen yaitu kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi secara bersama-sama (simultan) dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu keterandalan pelaporan keuangan. Berikut tabel hasil uji F adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Uji Simultan

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	122.26	3	17.720	.000 ^a
	Residual	163.28	71		
	Total	285.54	74		

Sumber: Data *Output* SPSS, 2015

Dari tabel hasil uji ANOVA atau F-test didapat nilai signifikansi sebesar 0,000; karena tingkat probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima. Artinya, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah yang berarti pemerintah daerah berperan dalam meningkatkan keterandalan pelaporan keuangannya.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alimbudiono dan Fidelis (2004) yang menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah.

4.5.2 Pengujian secara parsial (t-test)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh parsial variabel independen terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Tabel 6. Uji Parsial

Model	Unstandarized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.			
					B	Std. Error	Beta
1	(Const)		8.755	2.202	3.97	.00	
	X1		.121	.055	.236	2.21	.03
	X2		.095	.046	.215	2.05	.04
	X3		.206	.055	.379	3.76	.00

Sumber: Data Output SPSS, 2015

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 6, maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada hasil dan pembahasan sebagai berikut :

a. Uji Variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (X_1)

Berdasarkan hasil pengujian data yang dapat dilihat pada tabel 6 maka diperoleh hasil uji t yang diperlukan. Untuk variabel kapasitas sumber daya manusia (X_1) nilai signifikansinya adalah $0,030 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia (X_1) berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah. Sehingga hipotesis pertama dari penelitian ini diterima.

b. Uji Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2)

Berdasarkan hasil pengujian data yang dapat dilihat pada tabel V.10 maka di peroleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen. Untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_2) nilai signifikansinya adalah $0,044 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi (X_2) berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah. Sehingga hipotesis kedua dari penelitian ini diterima.

c. Uji Variabel Pengendalian Intern Akuntansi (X_3)

Berdasarkan hasil pengujian data yang dapat dilihat pada tabel V.10 maka di peroleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen. Untuk variabel pengendalian intern akuntansi (X_3) nilai signifikansinya adalah $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah. Sehingga hipotesis ketiga dari penelitian ini diterima.

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

4.6.1 Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia (X_1) terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Hasil uji hipotesis pertama (H_1) didapatkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah. Kapasitas sumber daya manusia diduga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keterandalan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan teori yang mengatakan kurangnya jumlah pegawai akuntansi serta latar belakang pendidikan akuntansi pada subbagian akuntansi/tata usaha keuangan pada satuan kerja pemerintah daerah Kab. Rokan Hilir yang dapat mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan adalah benar. Karena dengan jumlah yang cukup serta memiliki latar pendidikan akuntansi, maka pegawai yang bekerja pada bagian keuangan akan dapat menerapkan pengelolaan keuangan daerah dengan baik, dan tidak menghambat jalannya pemerintahan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) dan Joe Sugandi (2013) yang menghasilkan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah.

4.6.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2) Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis, tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Hasil uji hipotesis kedua (H_2) didapatkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah menunjukkan bahwa semakin baik teknologi informasi seperti *hardware* maupun *software* maka akan mengakibatkan keterandalan pelaporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin baik. Jika semakin baik pemanfaatan teknologi informasi juga akan memudahkan manusia/pegawai bekerja. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi dibutuhkan organisasi agar dapat meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu Indriasari dan Naharyato (2008), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), Faristina Rosalin (2011) dan Joe Sugandi (2013) yang mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan.

4.6.3 Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi (X_3) Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Hasil uji hipotesis ketiga (H_3) didapatkan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah. Pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian intern akuntansi maka akan mengakibatkan pelaporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin baik dan andal.

Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengendalian intern akuntansi yang baik pada pemerintah daerah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik pada pelaporan keuangan salah satunya adalah keterandalan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu Indriasari dan Naharyato (2008), Faristina Rosalin (2011) dan Joe Sugandi (2013) yang mengemukakan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah.

4.6.4 Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Secara simultan variabel kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada Tabel V.9 pada uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung sebesar 17,720 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 oleh karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05. Hipotesis keempat (H4), artinya kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu Faristina Rosalin (2011) dan Joe Sugandi (2013).

Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah. Untuk menciptakan keterandalan pelaporan keuangan maka dibutuhkan sumber daya manusia yang baik dan cukup untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik, serta teknologi informasi yang dimanfaatkan agar memudahkan pekerjaan organisasi, juga perlu pengendalian intern akuntansi untuk mengontrol jalannya organisasi.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara simultan, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Secara parsial, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah

Daftar Pustaka

- Arfianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang. Skripsi Universitas Diponegoro : Semarang.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Griffin, Ricky. 2004. Manajemen. Jakarta: Gramedia.
- Hall, James A. 2009. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi 4. Jakarta . Penerbit salemba empat.
- Hilmi, Utari. Syaiful Ali. 2008. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di BEJ Periode 2004-2007. Jurnal Akuntansi.
- Indriasari, Desi. Ertambang Nahartyo. 2009. Pengaruh kapasitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Studi pada Pemerintah kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir. Jurnal Akuntansi.
- Kawedar, Warsito. Abdul Rohman, Sri Handayani. 2008. Akuntansi Sektor Publik Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kusmayadi, Dedi. 2009. Pengaruh Pengawasan Intern dan Penatausahaan keuangan Daerah terhadap Good Government, Suervei pada Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Jurnal Ichsan Gorontalo. Vol. 4. No. 2 Edisi Mei – Juli 2009.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta.
- , 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2 No. 1.
- Mustafa, Santiadji, Sutrisno, Rosid. 2010. Analisis Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktun Pelaporan Keuangan Pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari. Jurnal Akuntansi.
- Nurillah, As Syifa. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok). Skripsi Universitas Diponegoro : Semarang.
- Rahardi, Dedi Rianto. 2007. Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Pelayanan Sektor Publik. Seminar Nasional teknologi 2007.
- Rosalin, Faristina. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum,

Studi pada BLU di Kota Semarang. Skripsi
Universitas Diponegoro : Semarang.

- Siregar, Astuti Handayani, I Ketut Suryanawa. 2009. Pemanfaatan TI dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Individual pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*. Vol. 4, No. 2 Juli 2009.
- Widyaningrum, Celviana Rahmawati. 2010. Pengaruh SDM, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variable Intervening Pengendalian Intern Akuntansi, Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten. *Simposium Nasional Akuntansi XII Purwokerto*.
- Zuliarti, 2012. Pengaruh kapasitas SDM, pemanfaatan TI dan Pengendalian intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*
- Rohilkab. Situs Resmi Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. Melalui ([http:// www.rohilkab.go.id](http://www.rohilkab.go.id)). Diakses tanggal [15/2/2015].
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah